



**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**





BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Mengingat : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...*g p*

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

sebagaimana... *TP*

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana... 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Kinerja... 

17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

e. Lampiran V...

- e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI : RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
- l. Lampiran XII : RENJA Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII : RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;
- n. Lampiran XIV : RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI : RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : RENJA Dinas Perikanan;
- s. Lampiran XIX : RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. Lampiran XX : RENJA Dinas Peternakan;
- u. Lampiran XXI : RENJA Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII : RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
- w. Lampiran XXII.1 : RENJA Bagian Hukum;
- x. Lampiran XXII.2 : RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan;
- y. Lampiran XXII.3 : RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- z. Lampiran XXII.4 : RENJA Bagian Organisasi;
- aa. Lampiran XXII.5 : RENJA Bagian Umum;
- bb. Lampiran XXII.6 : RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
- cc. Lampiran XXIII : RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;

ee. Lampiran XXV... *9/2*

- ee. Lampiran XXV : RENJA Badan Pendapatan Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobalain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V... 

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI ROTE NDAO, 



APALLINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 068

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya

KEPADA BAGIAN KUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



HARYANTO, S. J. MOOTAH, M.Si
NIM 19941696 201101 1 012

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

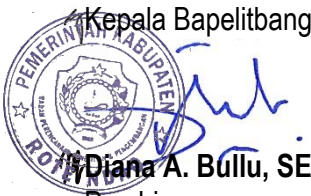
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaanNya, maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Walaupun masih ditemui berbagai masalah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut akibat Sumber Daya Manusia Aparatur yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya, belum adanya kesepahaman sektor-sektor terkait akan pentingnya pelaksanaan perencanaan pembangunan, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan serta keterbatasan pendanaan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini adalah Rencana Tahunan yang disusun sebagai pedoman yang taktis dan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan guna keberhasilan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini tentunya masih belum sempurna, oleh karena itu apabila ada saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini.

Ba'a, 28 Juli 2023

Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,



Diana A. Bullu, SE

Pembina

NIP. 19801209 200904 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	27
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 31
 BAB V PENUTUP.....	 37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Evaluasi Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Triwulan IV Tahun 2022.....	12
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao.....	15
Tabel 3. Review Rancangan Awal RKPD Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.....	18
Tabel 4. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022 dan substansi Perubahan Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4148);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055);

- 17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 049);
- 18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024. (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 065);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Ranwal Renja adalah sebagai pedoman:

- 1. Pelaksanaan pelayanan Bapelitbang;
- 2. Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; serta
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD;
 4. Lampiran tabel rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
 3. Tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya serta
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Bapelitbang ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun anggaran 2022, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bapelitbang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.5.004.102.850,- dengan realisasi sebesar Rp.4.926.730.656,- atau 98,45% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.1.947.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.890.505.456,- atau 97,07%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.859.535.550,- dengan realisasi sebesar Rp.2.845.608.400,- atau 99,5% dan belanja modal sebesar Rp.197.070.870,- dengan realisasi sebesar Rp.190.616.800,- atau 96,73%.

Rencana fisik secara kumulatif dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan sampai dengan kondisi triwulan IV Tahun 2022 mencapai Rp.4.926.730.656,- atau sebesar 98,45%. Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran tidak ada.

B. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya.
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/kota.
9. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD.
10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/kota
 - Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
- III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan

- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam
- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam.

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.
- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.
- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup

15. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

V. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

16. Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

- Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan

C. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran tidak ada

- D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada.**
- E. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi–implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:**
- a. Tersedianya informasi/data yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya: Data Statistik;
 - b. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring Perencanaan Pembangunan daerah.
- F. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:**
- a. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
 - b. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD;
 - c. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD untuk mempedomani dokumen perubahan RPJMD yang dijabarkan ke dalam perubahan Renstra PD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menentukan program dan kegiatan di setiap OPD;
 - d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bapelitbang.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2022 seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Evaluasi Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Triwulan IV Tahun 2022

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+ 8+9+10	12 = 11/6*100	13 = 5+11	14 = 13/4*100														
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran	100	%	8,824,204,999	100.00	%	2,263,558,964	100	%	2,665,662,700	19.74	382,129,281	38.16	573,449,502	19.74	621,337,550	22.37	1,019,200,823	100.00	2,596,117,156	100.00	97.39	50.00	4,859,676,120	50.00	55.07
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%		100.00	%		100	%		16.70		9.04		67.13		7.13		100.00		100.00		50.00		50.00	50.00
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	76	dok	92,409,589	19	dok	31,956,800	19	dok	19,962,580	-	-	13	9,571,800	2	8,738,000	4.00	1,635,000	19	19,944,800	100.00	99.91	38	51,901,600	50.00	56.16
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	48	dok	80,284,290	12	dok	28,963,400	12	dok	16,966,400	-	-	8	6,586,000	1	8,738,000	3.00	1,635,000	12	16,959,000	100.00	99.96	24	45,922,400	50.00	57.20
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	28	dok	12,125,299	7	dok	2,993,400	7	dok	2,996,180	-	-	5	2,985,800	1	-	1.00	-	7	2,985,800	100.00	99.65	14	5,979,200	50.00	49.31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	7,179,880,400	100	%	1,694,383,094	100	%	1,959,598,000	25.00	306,094,581	25.00	468,824,802	25	500,163,700	25.00	627,520,373	100.00	1,902,603,456	100.00	97.09	50.00	3,596,986,550	50.00	50.10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bln	6,897,578,400	12	bln	1,626,857,094	12	bln	1,888,546,000	3	306,094,581	3	461,346,802	3	468,381,700	3.00	595,732,373	12	1,831,555,456	100.00	96.98	24	3,458,412,550	50.00	50.14
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	48	Bln	282,302,000	12	bln	67,526,000	12	bln	71,052,000	3	-	3	7,478,000	3	31,782,000	3.00	31,788,000	12	71,048,000	100.00	99.99	24	138,574,000	50.00	49.09
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	bln	40,090,000	12	bln	9,980,000	12	bln	9,960,000	3	-	3	-	3	4,500,000	3.00	5,459,000	12	9,959,000,000	100.00	99.99	24	19,939,000	50.00	49.74
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	48	bln	40,090,000	12	bln	9,980,000	12	bln	9,960,000	3	-	3	-	3	4,500,000	3.00	5,459,000	12	9,959,000,000	100.00	99.99	24	19,939,000	50.00	49.74
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	48	bln	482,730,000	12	bln	107,500,000	12	bln	120,000,000	3	7,500,000	3	7,500,000	3	27,500,000	3.00	75,000,000	12	117,500,000	100.00	97.92	24	225,000,000	50.00	46.61
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	48	bln	482,730,000	12	bln	107,500,000	12	bln	120,000,000	3	7,500,000	3	7,500,000	3	27,500,000	3.00	75,000,000	12	117,500,000	100.00	97.92	24	225,000,000	50.00	46.61
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	947,817,710	100	%	267,683,080	100	%	422,304,860	3.83	45,988,950	21.70	51,898,470	46	40,010,300	28.09	277,874,300	100.00	415,772,020	100.00	98.45	50	683,455,100	50.00	72.11
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192	Buah	8,860,700	48	buah	2,651,000	41	buah	2,053,700	-	-	41.00	2,052,050	-	-	-	41.00	2,052,050	100.00	99.92	89	4,703,050	46.35	53.08	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	Unit	241,423,950	10	unit	52,827,200	6	unit	193,536,370	-	-	-	8,580,000	2	750,000	4	177,752,800	6	187,082,800	100.00	96.67	16	239,910,000	40.00	99.37
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	48	Bulan	151,262,720	12	Bulan	45,355,000	12	Bulan	35,033,290	3	22,996,600	3	11,363,000	3	-	3	673,650	12	35,033,250	100.00	100.00	24	80,388,250	50.00	8.71
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	48	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3		3		3	3		12	100.00		24		50.00			
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	620	Buku	129,318,340	155	Buku	49,999,830	155	Buku	26,240,500	-	3,800,350	-	9,269,720	100	6,609,900	55	6,560,500	155.00	26,240,470	100.00	100.00	310	76,240,300	50.00	8.71
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	88	kali	416,952,000	22	kali	116,850,050	9	kali	165,441,000	3	19,192,000	4	20,633,700	1	32,650,400	1.00	92,887,350	9	165,363,450	100.00	99.95	31	282,213,500	35.23	67.68
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	264,789,550	89.20	%	55,573,480	100	%	66,988,650	39.82	15,442,900	1.4	16,403,930	57.01	15,637,350	1.81	16,011,100	100.00	63,495,280	100.00	94.79	47	119,068,760	47.30	44.97
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	1276	lembar	12,893,600	317	lembar	3,854,000	209	lembar	2,988,700	85	538,500	-	420,000	123.00	2,028,000	1.00	-	209	2,986,500	100.00	99.93	526	6,840,500	41.22	53.05
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	48	Bulan	251,895,950	12	Bulan	51,719,480	12	Bulan	63,999,950	3	14,904,400	3	15,983,930	3.00	13,609,350	3.00	16,011,100	12	60,508,780	100.00	94.55	24	112,228,260	50.00	44.55
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	299,217,750	99.37	%	96,482,510	100	%	66,848,610	0.71	7,102,850	0.71	19,250,500	89.05	24,788,200	9.54	15,701,050	100.00	66,842,600	100.00	99.99	50	163,325,110	49.84	54.58
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	56	unit	208,200,000	14	unit	54,182,810	14	unit	50,752,000	1	6,302,850	1	13,835,000	5.00	20,475,500	7.00	10,132,650	14	50,746,000	100.00	99.99	28	104,928,810	50.00	50.40
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4	unit		1	unit		1	unit		-	-	-	-	-	1.00		1	100.00		2		50.00			
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	144	unit	34,578,850	36	unit	9,974,000	20	unit	8,119,410	1	800,000	1	2,970,000	-	1,324,000	18.00	3,025,400	20	8,119,400	100.00	100.00	56	18,093,400	38.89	52.33
16	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4	unit	44,415,500	1	unit	29,337,000	1	unit	4,988,500	-	-	-	2,445,500	-	-	1.00	2,543,000	1.00	4,988,500	100.00	100.00	2	34,325,500	50.00	77.28
17	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	988	kg	12,023,400	247	kg	2,988,700	247	kg	2,988,700	-	-	-	247.00	2,988,700	-	-	247.00	2,988,700	100.00	100.00	494	5,977,400	50.00	49.71	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		K	Rp	K	Rp					
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+ 8+9+10				12 = 11/6*100				13 = 5+11		14 = 13/4*100							
II	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100	%	6,629,050,300	99.16	%	1,641,098,430	100	%	1,094,059,000	71.43	79,122,100	9.52	369,596,100	4.76	248,392,850	14.29	395,290,400	100.00	1,092,401,450	100.00	99.85	50	2,733,499,880	49.79	41.24
		Konsistensi RPJMD dan RKPD	100	%		99.16	%		100	%		12.50		25.00			25.00		37.50		100.00		100.00	50		49.79	
		kOnsistensi RKPD dan APBD	100	%		99.16	%		100	%		40.00		-		-	-	60.00		100.00		100.00	50		49.79		
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	4,629,364,970	100	%	1,185,778,930	100	%	651,932,300	71.43	69,336,200	14.29	272,654,550	4.76	174,581,600	9.52	134,338,400	100.00	650,910,750	100.00	99.84	50	1,836,689,680	50.00	39.67
18	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya penyusunan perencanaan usulan Provinsi, Nasional dan DAK Fisik	12	dok	426,940,260	3	dok	134,087,200	3	dok	91,920,350	1	755,700	1	12,260,600	-	34,771,000	1.00	44,123,700	3	91,911,000	100.00	99.99	6	225,998,200	50.00	52.93
19	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya konsultasi publik penyusunan RKPD 2023	8	kali	120,944,070	2	kali	32,299,500	1	kali	18,644,100	0	370,700	1.00	18,266,400	-	-	-	-	1	18,637,100	100.00	99.96	3	50,936,600	37.50	42.12
20	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tersedianya dokumen Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4	dok	240,260,910	1	dok	86,718,500	1	dok	51,541,300	1	1,429,800	-	50,111,500	-	-	-	-	1	51,541,300	100.00	100.00	2	138,259,800	50.00	57.55
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersedianya usulan prioritas kabupaten , provinsi, nasional	12	dok	375,278,800	3	dok	75,427,200	3	dok	99,789,200	2	9,174,200	1	89,610,250	-	-	-	860,000	3	99,644,450	100.00	99.85	6	175,071,650	50.00	46.65
22	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya usulan prioritas kecamatan	40	dok	368,560,520	10	dok	103,199,500	11	dok	85,360,520	11	53,816,100	-	31,543,400	-	-	-	-	11	85,359,500	100.00	100.00	21	188,559,000	52.50	51.16
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RKPD 2022	4	dok	3,097,380,410	1	dok	754,047,030	1	dok	304,676,830	-	3,789,700	-	70,862,400	1.00	139,810,600	-	89,354,700	1.00	303,817,400	100.00	99.72	2	1,057,864,430	50.00	6.38
		Terlaksananya penyusunan Perubahan RKPD	4	dok		1	dok	1	dok	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	100.00	2								
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Aplikasi	817,051,000	3	Apl	184,108,750	2	Apl	206,709,100	0	8,526,400	-	34,027,050	-	25,973,550	2.00	137,553,100	2	206,080,100	100.00	99.74	1	390,188,850	41.67	47.76
		8	Jenis Buku	2		Jenis buku	3	Jenis buku	2.00	-	-	-	1.00	3.00	100.00	1											
24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan data statistik daerah (IHK, KDA)	8	Jenis Buku	380,773,300	2	Jenis buku	47,913,600	2	Jenis buku	110,911,100	-	6,839,800	-	34,027,050	-	8,510,050	2.00	61,262,200	2.00	110,639,100	100.00	99.75	4	158,552,700	50.00	41.64
		4	Aplikasi	1		Aplikasi	1	Aplikasi	-	-	-	1.00															
25	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Penyediaan data informasi pembangunan daerah (SIPD)/ e- database, e-planning RKPD dan e-Planning RPJMD	3	Aplikasi	436,277,700	3	Aplikasi	136,195,150	3	Aplikasi	95,798,000	2	1,686,600	-	-	-	17,463,500	1.00	76,290,900	3	95,441,000	100.00	99.63	6	231,636,150	200.00	53.09
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Penyusunan dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	32	dok	1,182,634,330	8	dok	271,210,750	8	dok	235,417,600	1	1,259,500	1	62,914,500	2.00	47,837,700	4.00	123,398,900	8	235,410,600	100.00	100.00	4	506,621,350	12.50	42.84
26	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penyusunan evaluasi hasil Renja / RKPD per triwulan	16	dok	384,797,490	4	dok	99,891,150	4	dok	94,797,700	1	544,500	1	27,154,000	-	18,436,000	2.00	48,656,200	4	94,790,700	100.00	99.99	8	194,681,850	50.00	50.59
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan perkembangan pembangunan fisik dan air minum dan penyehatan lingkungan/PKP	4	dok	797,836,840	4	dok	171,319,600	4	dok	140,619,900	-	715,000	-	35,760,500	2.00	29,401,700	2.00	74,742,700	4.00	140,619,900	100.00	100.00	8	311,939,500	200.00	39.10
III	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	100	%	2,682,788,000	97.22	%	682,289,000	100	%	640,980,830	37.04	49,718,200	1.23	126,632,800	49.38	149,840,150	12.35	310,072,950	100.00	636,264,100	100.00	99.26	49	1,318,553,100	49.31	49.15
		Cakupan dokumen perencanaan bidang Prekonomian dan Sumber Daya Alam	100	%		97.22	%		100	%		35.56		-		40.00		24.44		100.00		100.00	49		49.31		
		Cakupan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%		97.22	%		100	%		-		26.92		50.00		23.08		100.00		100.00	49		49.31		
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	224	dok	1,065,379,310	56	dok	268,441,700	58	dok	257,099,600	29.00	23,259,600	-	56,283,450	29	69,223,340	0	105,381,300	58	254,147,690	100.00	98.85	29	522,589,390	12.72	49.05
28	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD Bidang Pemerintahan	152	dok	81,592,880	38	dok	19,999,000	38	dok	19,999,890	19	6,711,100	-	1,962,900	19	345,700	0	10,980,000	38	19,999,700	100.00	100.00	76	39,998,700	50.00	49.02
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	16	Kali	150,038,730	4	kali	39,847,800	4	kali	34,999,930	1	6,378,900	-	9,939,600	2	2,969,300	1	15,600,000	4	34,887,800	100.00	99.68	8	74,735,600	50.00	49.81
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia	72	dok	143,297,700	18	dok	34,245,500	20	dok	34,999,820	10	4,869,700	-	9,801,650	10	3,418,440	0	16,909,500	20	34,999,290	100.00	100.00	38	69,244,790	52.78	48.32

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+ 8+9+10	12 = 11/6*100	13 = 5+11	14 = 13/4*100				
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Fasilitasi kerjasama antara Pemda Kab. Rote Ndao dan Lembaga Mitra/NGO Pembentukan dan Fasilitasi Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Monev Pembangunan Manusia dan Aksi Konvergensi Stunting	104 kali	690,450,000	26 kali	174,349,400	11 kali	167,099,960	-	5,299,900	1	34,579,300	5	62,489,900	5	61,891,800	11	164,260,900	100.00	98.30	37	338,610,300	35.58	49.04
			3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		-	-	-	-	2		1	3		100.00		6	-	200.00		
			1 Forum		1 Forum		1 Forum		-	-	-	-	-		1	1		100.00		2	-	200.00		
			56 Kali		14 Kali		4 Kali		-	-	-	2.00			2	4		100.00		18	-	32.14		
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	104 dok	864,738,700	26 dok	226,495,400	26 dok	201,999,990	12.00	21,711,000	-	24,062,900	12	49,144,100	2.00	105,855,600	26	200,773,600	100.00	99.39	13	427,269,000	12.50	49.41
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD Bidang Perekonomian	56 dok	81,593,830	14 dok	19,999,400	14 dok	19,999,980	7.00	5,046,800	-	2,575,300	7	1,102,200	0	11,275,600	14	19,999,900	100.00	100.00	28	39,999,300	50.00	49.02
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20 kali	174,152,520	5 kali	42,071,300	5 kali	42,051,570	2.00	1,656,600	-	10,063,500	1	6,458,400	2	22,740,700	5	40,919,200	100.00	97.31	10	82,990,500	50.00	47.65
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD Bidang SDA	40 dok	81,594,690	10 dok	19,999,300	10 dok	19,999,700	5.00	5,735,400	-	2,328,100	5	1,493,300	0	10,442,900	10	19,999,700	100.00	100.00	20	39,999,000	50.00	49.02
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Tersedianya laporan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDGs	60 kali	527,397,660	15 kali	144,425,400	14 kali	119,948,740	2	9,272,200	-	9,096,000	5	40,090,200	7	61,396,400	14	119,854,800	100.00	99.92	29	264,280,200	48.33	19.44
			8 dok		2 dok		2 dok		-	-	-	-	-		2	2.00		100.00		4		50.00		
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	44 dok	752,669,990	11 dok	187,351,900	11 dok	181,881,240	-	4,747,600	5	46,286,450	5.00	31,472,710	1.00	98,836,050	11	181,342,810	100.00	99.70	6	368,694,710	12.50	48.98
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Infrastruktur	16 dok	81,594,850	4 dok	19,498,600	4 dok	19,999,880	-	4,747,600	2	508,750	2.00	1,012,060	0	13,731,200	4	19,999,610	100.00	100.00	8	39,498,210	50.00	48.41
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	20 Kali	156,526,750	5 kali	37,034,000	5 kali	37,800,750	-	-	1	8,096,000	2	8,437,750	2.00	21,195,000	5	37,728,750	100.00	99.81	10	74,762,750	50.00	47.76
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terfasilitasinya penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja Dinas PKPLH, Dinas KOMINFO dan Bagian Administrasi Layn. Pengadaan Barang dan Jasa	24 dok	163,189,210	6 dok	39,499,400	6 dok	39,999,490	-	-	3	17,770,700	3.00	2,007,800	0	20,213,850	6	39,992,350	100.00	99.98	12	79,491,750	50.00	48.71
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Penyusunan dokumen RP2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2024	52 kali	351,359,180	13 kali	91,319,900	10 kali	84,081,120	-	-	1	19,911,000	6.00	20,015,100	3	43,696,000	10	83,622,100	100.00	99.45	23	174,942,000	44.23	49.79
			4 dok		1 dok		1 dok		-	-	-	-	-		1	1.00		100.00		2		50.00		
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan Tersedianya data penelitian/pengkajian stunting Terlaksananya penelitian/pengkajian stunting Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	12 jenis	1,987,094,001	3 Jenis	384,588,750	3 Jenis	569,788,940	-	2,625,000	-	21,076,300	-	174,552,070	3.00	370,518,830	3	568,772,200	100.00	99.82	2	953,360,950	12.50	47.98
			4 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		-	-	-	-	-		1		1	100.00		1		25.00		
			4 jenis		1 jenis		1 Jenis		-	-	-	-	-		1	1.00		100.00		1		25.00		
			100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	-		100.00	100		100.00		50		50.00		
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan	4 Jenis	1,280,525,011	1 Jenis	111,126,900	1 Jenis	385,000,160	-	2,625,000	-	1,512,000	-	148,891,020	1.00	231,808,630	1	384,836,650	100.00	99.96	2	495,963,550	50.00	38.73
40	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penelitian/pengkajian Air Tanah	4 jenis	1,280,525,011	1 jenis	111,126,900	1 jenis	385,000,160	-	2,625,000	-	1,512,000	-	148,891,020	1.00	231,808,630	1.00	384,836,650	100.00	99.96	2	495,963,550	50.00	38.73
15	Pengembangan inovasi dan teknologi	Terlaksananya koordinasi litbang dan penerapan lptek/desiminasi teknologi	100 %	706,568,990	98.54 %	273,461,850	100 %	184,788,780	-	-	-	19,564,300	-	25,661,050	100.00	138,710,200	100.00	183,935,550.00	100.00	99.54	49.64	457,397,400	49.64	64.73
41	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Terlaksananya koordinasi bidang penelitian, pengembangan	56 kali	539,225,120	14 kali	83,137,650	kali	26,580,100	-	-	-	839,300	-	-	14.00	25,740,800	14.00	26,580,100	100.00	100.00	-	109,717,750	0.00	20.35
					14		46 Inovasi		-	-	-	-	-		46.00		46.00		100.00		-		0.00	
42	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Terlaksananya penerapan lptek/desiminasi teknologi POH	4 jenis	167,343,870	1 jenis	190,324,200	1 jenis	158,208,680	-	-	-	18,725,000	-	25,661,050	1.00	112,969,400	1.00	157,355,450	100.00	99.46	2	347,679,650	50.00	207.76

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)			
									I		II		III		IV											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+ 8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 5+11		14 = 13/4*100			
IV	PENGELOLAAN PERBATASAN	Tersedianya perencanaan Pengelolaan perbatasan	4 dok	138,262,000	1 dok	34,800,300	1 dok	33,610,950	-	-	-	4,721,100	-	4,604,000	1.00	23,850,650	1.00	33,175,750	100.00	98.71	2	67,976,050	50.00	49.16		
16	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Tersedianya dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	4 dok	138,262,000	1 dok	34,800,300	1 dok	33,610,950	-	-	-	4,721,100	-	4,604,000	1.00	23,850,650	1.00	33,175,750	100.00	98.71	2	67,976,050	50.00	49.16		
43	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	4 dok	138,262,000	1 dok	34,800,300	1 dok	33,610,950	-	-	-	4,721,100	-	4,604,000	1.00	23,850,650	1.00	33,175,750	100.00	98.71	2	67,976,050	50.00	49.16		
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)			100 %	20,261,399,300	97.01 %	5,006,335,444	100 %	5,004,102,420	16.59	513,594,581	8.82	1,095,475,802	54.50	1,198,726,620	20	2,118,933,653	100.00	4,926,730,656	100.00	98.45	49.25	9,933,066,100	49.25	49.02		
Predikat Kinerja																					ST	ST			ST	ST
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		: Disiplin Kerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		: Belum lengkapnya data penunjang indikator dan jadwal realisasi belum sesuai dengan rencana anggaran kas																								
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Terus berkoordinasi dan mempercepat realisasi anggaran																								
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya		: Capaian kinerja dan keuangan di tingkatkan lagi pada semester berikutnya																								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan, baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) dan dari tingkat atas (*top-down*) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik serta partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik.

Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bapelitbang, maka ditetapkan beberapa rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 2. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
- 3. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
- 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan
- 5. Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan
- 6. Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator	Kondisi Kerja Pada Tahun Awal	Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Realisasi			Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Urusan Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
II	Pengelolaan Perbatasan Daerah							
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan	1	1	2	3	4	5	5
III	Urusan Penelitian dan pengembangan							
5	Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan (Jenis)	2	3	6	9	12	15	15
6	Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2022 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2022 berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada. Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2022 adalah:

1. Lemahnya koordinasi dan komitmen PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada proses perencanaan;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dari Perangkat Daerah kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting;
3. Keterbatasan pegawai dilingkup Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi kurang maksimal;
4. Konsistensi perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022;
5. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPd khususnya terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah belum valid dan akurat;

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tahun 2022 merupakan upaya – upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun 2019 –2024. Tahun 2022 merupakan tahun ke ketiga bagi Bapelitbang untuk menghasikan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terjadi selama tahun 2022.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dari permasalahan dan hambatan yang teridentifikasi dan tidak mendapatkan penanganan secara lebih lanjut akan berdampak pada penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berakibat pada keterlambatan proses penganggaran, sehingga penyelenggaraan kualitas pelayanan publik mengalami hambatan;

2. Ketidakakuratan data dan informasi perencanaan pembangunan mengakibatkan perencanaan kebijakan dan program penanganan yang tidak tepat sasaran, sehingga kinerja sasaran yang diagendakan dalam RPJMD kurang efektif
 3. Keterpaduan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah kurang optimal, sesuai perencanaan program antar tingkatan pemerintahan maupun antar sumber pendanaan belum dapat sinergis dan saling menunjang;
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
- Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Bapelitbang mempunyai peranan yang sangat penting dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
- Disamping permasalahan seperti yang pada poin b diatas, Bapelitbang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Rote Ndao yang bermartabat. Untuk itu Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut:
1. Pentingnya peran Bapelitbang yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
 2. Kualitas SDM Bapelitbang yang cukup handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
 4. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
 5. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.
- e. Formulasi isu-isu penting/rekomendasi dan catatan yang strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan antara lain:
1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal.
 2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota.
 3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD.
 4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi pemerintah daerah lainnya (*e-data, e-budgeting, dan e-monev*) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.
 5. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1. Proses yang dilakukan untuk membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu:
- 2. Proses perbandingan dilakukan agar Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan dana, program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023.
- 3. Dalam membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja maupun kebutuhan dana di Bapelitbang Kab. Rote Ndao.

Adapun tabel review terhadap Rancangn Awal RKPD Tahun 2023 pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Review Rancangan Awal RKPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
	PERENCANAAN				4,832,908,145	PERENCANAAN				4,832,908,145
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,688,416,802	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,688,416,802
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		100 %			Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	(Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lobalain)	19 Dokumen	20,561,725	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	(Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lobalain)	19 Dokumen	20,561,725
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12 Dokumen	16,965,660	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12 Dokumen	16,965,660
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	7 Laporan	3,596,065	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	7 Laporan	3,596,065
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	29 Org/Bln	2,147,785,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	29 Org/Bln	2,147,785,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	29 Org/Bln	2,076,733,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	29 Org/Bln	2,076,733,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	71,052,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	71,052,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	1 Dokumen	9,960,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	1 Dokumen	9,960,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	9,960,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	9,960,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	120,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	120,000,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	120,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	120,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	228,101,992	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	228,101,992
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Paket	2,047,950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Paket	2,047,950
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Paket	78,161,205	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Paket	78,161,205
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Paket	34,639,992	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Paket	34,639,992
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Paket	26,239,845	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Paket	26,239,845
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	87,013,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	87,013,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	27,008,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	27,008,400
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	27,008,400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	27,008,400
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	67,383,830	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	67,383,830
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	3,388,830	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	3,388,830
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	63,995,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	1 Laporan	63,995,000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	67,615,855	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	67,615,855
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	15 Unit	50,750,000	Penyediaan Jasa G13Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	15 Unit	50,750,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	20 Unit	8,472,035	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	20 Unit	8,472,035
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	4,969,470	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	4,969,470
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	3,424,350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Unit	3,424,350
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan		100 %	1,065,172,808	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan		100 %	1,065,172,808
		Konsistensi RKPD dan APBD		100 %			Konsistensi RKPD dan APBD		100 %	
		Konsistensi RPJMD dan RKPD		100 %			Konsistensi RPJMD dan RKPD		100 %	
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	644,008,048	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalain)	100 %	644,008,048
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Dokumen	71,090,925	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Dokumen	71,090,925
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Berita Acara	16,440,860	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Berita Acara	16,440,860

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Berita Acara	44,653,150	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Berita Acara	44,653,150
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Berita Acara	90,158,613	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Berita Acara	90,158,613
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	11 Usulan	67,484,430	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	11 Usulan	67,484,430
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Dokumen	354,180,070	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Dokumen	354,180,070
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	55,426,568	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	55,426,568
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Buku	55,426,568	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Buku	55,426,568
		Jumlah Buku Statistik Daerah		2 Buku			Jumlah Buku Statistik Daerah		2 Buku	
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	240,692,042	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	240,692,042
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	32,093,330	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	32,093,330
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	8 Laporan	208,598,712	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	8 Laporan	208,598,712
12	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	125,046,150	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %	125,046,150
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang Dikelola	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	52,956,580	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang Dikelola	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Dokumen	52,956,580
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Dokumen	72,089,570	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Dokumen	72,089,570

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT dan Luar Daerah, KAB. ROTE NDAO)	100 %	690,668,409	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT dan Luar Daerah, KAB. ROTE NDAO)	100 %	690,668,409
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		100 %			Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		100 %	
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %			Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %	
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	58 Laporan	330,104,277	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	58 Laporan	330,104,277
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	40 Laporan	19,999,974	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	40 Laporan	19,999,974
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Laporan	32,971,524	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2 Laporan	32,971,524
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	18 Laporan	35,018,860	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	18 Laporan	35,018,860
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Fasilitasi kerjasama antara Pemda Kab. Rote Ndao dan Lembaga Mitra/NGO	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Lembaga	242,113,919	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Fasilitasi kerjasama antara Pemda Kab. Rote Ndao dan Lembaga Mitra/NGO	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Lembaga	242,113,919
		Forum Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Kegiatan			Forum Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Kegiatan	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	6 Laporan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	6 Laporan	
		Pembentukan dan Fasilitasi Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Forum			Pembentukan dan Fasilitasi Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Forum	
		Terlaksananya Monev Pembangunan Manusia dan Aksi Konvergensi Stunting	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan			Terlaksananya Monev Pembangunan Manusia dan Aksi Konvergensi Stunting	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	26 Laporan	180,789,141	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	26 Laporan	180,789,141
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	14 Laporan	19,999,684	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	14 Laporan	19,999,684
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	4 Laporan	37,863,907	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	4 Laporan	37,863,907
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	10 Laporan	19,999,902	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	10 Laporan	19,999,902
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	7 Laporan	102,925,648	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	7 Laporan	102,925,648
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDGs		1 Laporan			Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDGs		1 Laporan	
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	10 Laporan	179,774,991	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	10 Laporan	179,774,991
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	19,999,969	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	19,999,969
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Laporan	58,399,909	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Laporan	58,399,909
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	6 Laporan	39,999,898	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	6 Laporan	39,999,898
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	3 Laporan	61,375,215	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	3 Laporan	61,375,215
		Jumlah Laporan RPIJM Bidang Cipta Karya	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB.ROTE NDAO)	1 Laporan			Jumlah Laporan RPIJM Bidang Cipta Karya	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	1 Laporan	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4		5	6	3	4		5	6
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah kelitbangn yang dilaksanakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Jenis	357,664,428	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah kelitbangn yang dilaksanakan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3 Jenis	357,664,428
		Meningkatkan indeks inovasi daerah		100 %			Meningkatkan indeks inovasi daerah		100 %	
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	75,602,740	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	75,602,740
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Laporan	75,602,740	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Laporan	75,602,740
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Kesehatan	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	2 Dokumen	116,089,172	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Kesehatan	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	2 Dokumen	116,089,172
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Dokumen	-
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Dokumen	116,089,172	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	1 Dokumen	116,089,172
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	5 Laporan	165,972,516	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	5 Laporan	165,972,516
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	26,599,750	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1 Laporan	26,599,750
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	139,372,766	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4 Laporan	139,372,766
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698
19	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	30,985,698

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak melibatkan pemangku kepentingan kelompok melalui kegiatan Musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan **TEMA: ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan’**. Tema **Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 diajabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yakni:**

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memiliki pedoman 8 arah kebijakan yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah dengan indikator yaitu Persentase meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah sebesar 100%.

2. Sasaran

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Indikator sasaran/target:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebesar 100 %
- b. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100 %
- c. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 100 %
- d. Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan sebanyak 1 Dokumen

Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah, Indikator sasaran/target:

- a. Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan sebanyak 3 jenis
- b. Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 100%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 5. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 13. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 14. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 7. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 15. Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya.
 16. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 17. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 18. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 19. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 20. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/kota.
 8. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 21. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 9. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 22. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/kota
 23. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
 10. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 24. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
 25. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 26. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
 27. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahah
 28. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 29. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 30. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
 31. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
 32. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam
 33. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam.
13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 34. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.
 35. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.
 36. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.
 37. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.
- IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 38. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 39. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 40. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan.
 41. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.
 15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 42. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 16. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 43. Uji coba penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- V. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
 17. Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
 44. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan

Uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi:

- a. Jumlah program 5, jumlah kegiatan 17, jumlah sub kegiatan 44
- b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebar di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan luar Provinsi NTT.
- c. Total kebutuhan dana yang diperlukan Kantor Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yang dirinci menurut sumber pendanaan sebesar Rp.5.908.833.670,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01				PERENCANAAN			5,908,833,670		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,565,086,424		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
						Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	12,550,525	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10,080,660	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2,469,865	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29 Org/Bln	2,291,800,708	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/Bln	2,225,535,988	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	66,264,720	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,960,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9,960,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	145,753,781	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,047,950	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	77,974,911	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10,030,737	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,700,183	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	63,995,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63,995,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	41,026,410	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	35,450,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	3,100,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,476,410	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100 %	839,177,445	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT dan Luar Daerah, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
						Konsistensi RKPD dan APBD	100 %			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
						Konsistensi RPJMD dan RKPD	100 %			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan	100 %	557,489,327	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	30,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	16,440,860	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	44,646,150	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	57,938,600	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan	67,484,430	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	340,979,287	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100 %	203,598,655	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	188,598,655	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	63,089,463	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	02	2.04		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.04		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	48,089,463	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	330,304,605	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT dan Luar Daerah, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
						Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 %			
						Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	74 Laporan	129,479,077	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	46 Laporan	32,971,322	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	66,507,755	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	28 Laporan	93,875,443	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	27,201,907	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	1 Laporan	15,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	36,673,536	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	18 Laporan	106,950,085	(Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2				3	4	5	6	7
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	15,575,094	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	15,000,000	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	11 Laporan	61,374,991	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	3 Jenis	2,160,291,535	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
					Meningkatkan indeks inovasi daerah	100 %			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan	19 Laporan	1,649,921,836	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.01 01	Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	10 Laporan	809,611,586	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	1 Laporan	120,000,000	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4 Rekomendasi	299,926,380	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.01 14	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	420,383,870	(Dalam dan Luar Kabupaten Rote Ndao, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	300,000,000	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.02 07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PengembanganPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	300,000,000	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Laporan	210,369,699	(Kantor Bapelitbang Kab.Rote Ndao,Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	210,369,699	(Kantor Bapelitbang Kab.Rote Ndao,Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	<i>Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun</i>	1 Dokumen	13,973,661	Kab. Rote Ndao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	<i>Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun</i>	1 Dokumen	13,973,661	Kab. Rote Ndao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	1 Dokumen	13,973,661	Kab. Rote Ndao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Bapelitbang sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bapelitbang, seluruh aparatur Bapelitbang secara berjenjang, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.
- c. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran (PPAS) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

Ba'a, 28 Juli 2023

Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,



Diana A. Bullu, SE

Pembina

NIP. 19801209 200904 2 005